



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : AVIRIANTO SURATNO
- Jabatan** : SEKRETARIS BADAN
- NHK** : 180677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.600.000.000**

- Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **60.000.000**

- MOTOR, NORTON 500 CC SEPEDA MOTOR Tahun 1954, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, MERCEDEZ BENZ E240 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **20.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **458.378.843**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **112.563.235**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **340.188.095**

Sub Total **Rp.** **5.591.130.173**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.591.130.173**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUMARDI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 110275

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 945.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 556.337.245

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.045.887.245

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.045.887.245



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARWANTO HERU SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **254762**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.647.723.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 3807 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 272.200.500
5. Tanah Seluas 2051 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 146.646.500
6. Tanah Seluas 3271 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 233.876.500
7. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.200.000
8. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.200.000
9. Tanah Seluas 3807 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 272.200.000
10. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.250.000
11. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL



SENDIRI Rp. 250.250.000

12. Tanah Seluas 3300 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL

SENDIRI Rp. 235.950.000

13. Tanah Seluas 3300 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL

SENDIRI Rp. 235.950.000

14. Tanah Seluas 2006 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL

SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 318.400.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 7.700.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI

Rp. 2.700.000

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G / MINIBUS Tahun 2015,

HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000

5. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 269.340.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 13.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.211.632.613****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 5.460.096.113****III. HUTANG****Rp. 11.817.848****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 5.448.278.265**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURANTO**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **232173**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.237.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/21 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 237.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/29 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
4. Bangunan Seluas 27.08 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **107.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, SUNDIRO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO125 CBS ISS SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000



6. MOTOR, YAMAHA 509 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	391.458.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.836.208.000
III. HUTANG	Rp.	202.825.001
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.633.382.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOVYANTO WIDADI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **468164**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.400.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13020 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 976.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3534 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.050.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2790 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 209.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **491.093.185**

1. MOBIL, CHEVROLET TRX 14 TURBO LTZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOBIL, JEEP LAND ROVER 2630 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 136.093.185
3. MOBIL, BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **190.923.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	350.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.432.816.185
III. HUTANG	Rp.	640.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.792.816.185

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI KUSUMANING UTAMI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA USAHA
3. NHK : 455385

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.600.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. LAINNYA, UNITED SPEDA BALAP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
3. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 197.182.682

F. HARTA LAINNYA Rp. 45.000.000

Sub Total Rp. 3.867.782.682

III. HUTANG Rp. 88.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.779.482.682

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI**
3. NHK : **476883**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.685.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/113 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/285 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.460.000.000
3. Tanah Seluas 2154 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 5440 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp. 1.305.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 926 m2/250 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp. 1.150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/288 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **249.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **125.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.603.750
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.066.603.750
III. HUTANG	Rp.	43.400.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.023.203.150

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ISRAFULHAYAT
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
- NHK** : 241851

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.700.000.000**
- Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/79 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
 - Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
 - Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/218 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
 - Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
 - Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **202.000.000**
- MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
 - MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
 - MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **1.750.000.000**
- D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**
- E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **444.185.151**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.096.185.151
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.096.185.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : AKHMAD RIZAL ARIFUDIN
- Jabatan** : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
- NHK** : 683518

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.475.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/152 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 2.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/52 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 602.000.000

- MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKKAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 375.000.000
- MOBIL, WULING AIR EV LONG RANGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 899.084.786

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.027.584.786

III. HUTANG Rp. 218.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.809.584.786

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BRAM HERTASNING
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
3. NHK : 220175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/150 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 835.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m²/150 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 247.000.000

1. MOBIL, INNOVA MINIBUS REBORN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, MAZDA II SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.777.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.099.777.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.099.777.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY YULIAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN KEAMANAN TRANSPORTASI
3. NHK : 659689

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/215 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1955 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 505.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 205.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.287.043

F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

Sub Total Rp. 3.302.287.043

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.302.287.043



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDANG PUJI LESTARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI PELAYARAN DAN PENERBANGAN
3. NHK : 469333

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , LAINNYA Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HADIAH Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 11.250.000

1. MOTOR, HONDA NC11C1C AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 1.250.000
2. MOTOR, HONDA ASF02N37MIAIT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 25.500.000

Sub Total Rp. 2.173.000.000

III. HUTANG Rp. 552.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.620.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERDIAN DANU TRIANTONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN,
PERKERETAAPIAN DAN INTEGRASI MODA
3. NHK : 812041

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	702.400.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m ² /31 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 128 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 102.400.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.700.000
1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000		
3. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA FL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	103.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	955.750.000
III. HUTANG	Rp.	270.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	685.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRI INDRIASTIWI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
3. NHK : 232137

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.868.696.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 299.696.000
2. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/52 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 299.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/97 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.430.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.061.772.650

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.099.668.650

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.099.668.650



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.